



---

## **Pengangguran Lulusan Sma, Smk, dan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam Era Bonus Demografi: Peluang yang Terabaikan Atau Beban Demografi Baru?**

---

### **INFO PENULIS**

Hari Ramdani  
Universitas Pendidikan Indonesia  
[hariramdani@upi.edu](mailto:hariramdani@upi.edu)  
+6285881335517

Rafa Annisa Fauziah  
Universitas Pendidikan Indonesia  
[rafaannisa@upi.edu](mailto:rafaannisa@upi.edu)  
+6283168057985

Siti Nur Aeni  
Universitas Pendidikan Indonesia  
[siti.nuraeni@upi.edu](mailto:siti.nuraeni@upi.edu)  
+6282127185683

Mirna Nur Alia Abdullah  
Universitas Pendidikan Indonesia  
[alyamirna@upi.edu](mailto:alyamirna@upi.edu)  
+6281222596127

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 6, No. 1, April 2026  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi***

Ramdani, H., Fauziah, R. A., Aeni, S. N., & Abdullah, M. N. A. (2026). Pengangguran Lulusan Sma, Smk, dan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam Era Bonus Demografi: Peluang yang Terabaikan Atau Beban Demografi Baru?. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 705-725.

### **Abstrak**

Indonesia saat ini telah memasuki periode bonus demografi, artinya kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk. Hal tersebut bisa memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada tantangan besar, yaitu tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi, karakteristik, faktor penyebab, serta dampak pengangguran terdidik, sekaligus menelaah apakah fenomena tersebut merepresentasikan peluang yang belum dimanfaatkan atau justru menjadi indikasi munculnya beban demografi baru. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan terbuka kepada 15 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah individu lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang berusia antara 18-25 tahun dan sedang dalam kondisi mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai literatur ilmiah, laporan resmi di bidang ketenagakerjaan, serta dokumen kebijakan yang relevan. Validitas data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kuesioner, telaah literatur, serta data statistik yang relevan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran paling tinggi terjadi pada lulusan SMK, kemudian diikuti oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini antara lain ketidaksesuaian kompetensi (skill mismatch) antara kurikulum yang masih berorientasi teoritis dengan kebutuhan industri yang menuntut keterampilan praktis, keterbatasan program magang yang berkualitas, tingginya ekspektasi

terhadap pekerjaan (seperti upah layak dan status formal), serta hambatan struktural berupa persyaratan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, seperti meningkatnya beban keluarga dan ketergantungan finansial, tetapi juga mencakup aspek psikologis, seperti stres, menurunnya rasa percaya diri, serta isolasi sosial, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas nasional. Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah langkah strategis, di antaranya penyempurnaan sistem pendidikan, penyediaan informasi lowongan kerja yang akurat dan terbuka, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan kapasitas dan kinerja tenaga kerja, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Mayoritas informan memandang pengangguran terdidik sebagai fenomena yang bersifat kontekstual, yakni dapat menjadi peluang apabila didukung oleh kebijakan yang selaras (*link and match*), penguatan pelatihan keterampilan, serta perluasan lapangan kerja. Namun, fenomena ini juga berpotensi menjadi beban demografi baru apabila berbagai persoalan struktural tidak ditangani secara sistematis. Penelitian ini menemukan bahwa bonus demografi di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, terutama akibat lemahnya keterhubungan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

**Kata Kunci:** bonus demografi, kebijakan di bidang pendidikan, mismatch keterampilan, dunia kerja, pengangguran pada lulusan terdidik.

### Abstract

Indonesia has currently entered a period of demographic bonus, which refers to a condition where the proportion of the productive-age population dominates the overall population structure. This situation presents a significant opportunity to drive national economic growth. However, this potential is confronted with a major challenge, namely the high rate of unemployment among graduates of secondary and higher education. This study aims to examine the conditions, characteristics, causal factors, and impacts of educated unemployment, as well as to analyze whether this phenomenon represents an untapped opportunity or instead indicates the emergence of a new demographic burden. The research employs a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through the distribution of an online questionnaire using Google Forms, consisting of open-ended questions directed to 15 respondents selected through purposive sampling. The respondents were individuals who graduated from senior high school (SMA), vocational high school (SMK), or higher education institutions, aged between 18–25 years, and currently seeking employment or unemployed. On the other hand, secondary data were obtained through a literature review, including scientific publications, official labor reports, and relevant policy documents. The validity of the data in this study was tested using source triangulation techniques by comparing questionnaire results, literature findings, and relevant statistical data. The findings indicate that the highest unemployment rate occurs among vocational high school (SMK) graduates, followed by senior high school (SMA) and higher education graduates. The main contributing factors include skill mismatch between theoretically oriented curricula and industry demands for practical skills, limited access to quality internship programs, high job expectations (such as decent wages and formal employment status), and structural barriers such as work experience requirements for fresh graduates. The impacts are not only economic, such as increased family burden and financial dependency, but also psychological, including stress, decreased self-confidence, and social isolation, which ultimately contribute to a decline in national productivity. From a policy perspective, this study identifies several strategic measures, including improving the education system, providing accurate and accessible job vacancy information, creating quality employment opportunities, enhancing workforce capacity and performance, and increasing female labor force participation. Most informants perceive educated unemployment as a contextual phenomenon, meaning it can become an opportunity if supported by aligned policies (*link and match*), strengthened skills training, and expanded job opportunities. However, it may also turn into a new demographic burden if structural issues are not addressed systematically. This study finds that Indonesia's demographic bonus has not been optimally utilized, mainly due to the weak alignment between the education system and labor market needs.

**Keywords:** demographic bonus, education policy, skill mismatch, labor market, educated unemployment

## A. Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif, yakni di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dalam periode tertentu (Purwati & Prasetyo, 2022). Kondisi ini menjadi peluang strategis karena besarnya jumlah usia produktif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor (Achmad et al., 2024). Bahkan, Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2025 dengan lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif (Meo et al., 2025).

Bonus demografi dapat dimaknai sebagai kondisi yang menghadirkan dua sisi, yaitu peluang sekaligus tantangan bagi suatu negara. Keadaan ini akan memberikan manfaat apabila tenaga kerja yang berada pada usia produktif dapat terserap secara maksimal di pasar kerja, baik pada skala nasional maupun internasional (Yunita, 2017). Namun demikian, bonus demografi juga dapat berubah menjadi beban apabila pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diiringi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, kualitas pendidikan yang baik, serta kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (Falikhah, 2017). Oleh sebab itu, keberhasilan dalam mengoptimalkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kesiapan sektor pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, serta arah kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan.

Meskipun demikian, bonus demografi kerap diibaratkan sebagai pedang bermata dua karena memiliki potensi membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, kondisi ini dapat menjadi keuntungan apabila negara mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi. Namun di sisi lain, bonus demografi dapat berubah menjadi beban apabila pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, kualitas pendidikan yang baik, serta kebijakan pembangunan yang efektif (Falikhah, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengoptimalkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kesiapan sektor pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, serta arah kebijakan pembangunan nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio ketergantungan penduduk nonproduktif berada pada angka 16,76 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 17 penduduk usia nonproduktif (Arum et al., 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase demografi yang relatif menguntungkan. Selain itu, Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja telah mencapai sekitar 140 juta dari total 273,5 juta jiwa, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi dalam sejarah demografi nasional (Arum et al., 2023).

Besarnya proporsi penduduk usia produktif membuka peluang signifikan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendorong investasi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2023) menyatakan bahwa dominasi usia produktif merupakan modal strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang pemanfaatannya sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Namun demikian, potensi tersebut dapat berubah menjadi beban apabila pasar kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (World Bank, 2010). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif dan ketersediaan lapangan kerja berisiko menyebabkan sebagian angkatan kerja tidak terserap, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan kelompok berpendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya daya serap pasar kerja serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, yang pada akhirnya memunculkan fenomena pengangguran terdidik.

Meskipun bonus demografi menawarkan peluang besar, pada kenyataannya dihadapkan pada ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga banyak lulusan belum siap kerja dan berkontribusi pada meningkatnya pengangguran terdidik usia 20–29 tahun (Sawitri & Widarini, 2025).

Pengangguran merupakan persoalan serius yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial. Meskipun keberadaan kawasan industri secara teoritis mampu menyerap banyak tenaga kerja, tingkat pengangguran terdidik di Indonesia masih tergolong tinggi. Data menunjukkan bahwa pengangguran justru lebih banyak berasal dari lulusan pendidikan menengah hingga tinggi dibandingkan lulusan pendidikan dasar (Siboro et al., 2025). Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015–2025 yang memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terdidik relatif stabil, namun tetap berada pada level tinggi, terutama pada lulusan menengah dan perguruan tinggi. Lulusan SMK secara konsisten mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah struktural, khususnya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Pengangguran terdidik adalah kondisi ketika individu yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA atau sederajat belum bekerja atau masih mencari pekerjaan (Mankiw, 2003 dalam Setyanti & Finuliyah, 2022). Fenomena ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja (skill mismatch), sehingga pendidikan belum menjamin terserapnya tenaga kerja terdidik (Ardhana et al., 2025). Selain itu, lembaga pendidikan di Indonesia cenderung lebih banyak menghasilkan pencari kerja daripada pencipta lapangan kerja, padahal lulusan juga membutuhkan soft skills dan keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan temuan Maryanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa peran sarjana sebagai pencipta lapangan kerja masih belum optimal.

Selain itu, keterbatasan akses informasi turut menjadi faktor yang memicu tingginya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Banyak institusi pendidikan masih berfokus pada transfer pengetahuan tanpa diimbangi dengan kesiapan penerapan di dunia kerja, sehingga kompetensi lulusan kerap tidak selaras dengan kebutuhan pasar. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja, masih terdapat kesenjangan antara pembelajaran formal dan tuntutan industri. Hal ini diperkuat oleh temuan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam pemberitaan Kompas (2026) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih lebih menekankan kuantitas lulusan dibandingkan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga banyak lulusan tidak sesuai dengan permintaan industri (Rizky, 2026).

Fenomena pengangguran terdidik tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Tenaga kerja terdidik umumnya lebih selektif dalam memilih pekerjaan karena mempertimbangkan minat dan passion (Putri, 2015 dalam Setyanti & Finuliyah, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian Fitria (2015) di Kota Pontianak yang menunjukkan bahwa pengangguran terdidik dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara karakteristik lulusan dengan peluang kerja serta tingginya ekspektasi terhadap pekerjaan. Sebagian besar lulusan cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan lokasi, jenjang pendidikan, dan keahlian, serta menginginkan pekerjaan yang aman, stabil, dan memiliki penghasilan sesuai harapan. Di sisi lain, keterbatasan daya serap sektor formal dan belum optimalnya fungsi pasar tenaga kerja turut memperparah kondisi ini.

Tingkat pengangguran umumnya lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik tenaga kerja, di mana masyarakat pedesaan yang cenderung berpendidikan lebih rendah tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan. Sebaliknya, masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensinya. Kondisi ini turut menjelaskan tingginya pengangguran terdidik di Indonesia, karena lulusan berpendidikan tinggi sering enggan menerima pekerjaan yang tidak sejalan dengan latar belakang pendidikannya (Zulfikar et al., 2024). Selain itu, penelitian Rahmawati dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa individu

dengan pendidikan lebih tinggi umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan, begitu pula kelompok usia muda yang cenderung mengalami masa pencarian kerja lebih panjang dibandingkan usia yang lebih tua.

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan teori Human Capital sebagai landasan analisis. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan teoritis yang lebih komprehensif. Teori Bonus Demografi dari Bloom dan Williamson (1998) digunakan untuk memahami potensi ekonomi dari dominasi penduduk usia produktif. Teori Human Capital dari Becker (1993) digunakan untuk menjelaskan pentingnya investasi pendidikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Teori Pengangguran Struktural dari Beveridge (1944) digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini juga memanfaatkan Teori Transisi Demografi dari Thompson (1929) dan Notestein untuk melihat perubahan struktur penduduk dalam proses pembangunan, serta Teori Struktural Fungsionalisme dari Parsons (1951) untuk memahami ketidakseimbangan fungsi antara sistem pendidikan dan pasar kerja dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya umumnya membahas bonus demografi sebagai peluang ekonomi atau sebagai potensi beban secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan fenomena pengangguran terdidik sebagai bagian dari dinamika bonus demografi masih terbatas, terutama dalam melihat apakah fenomena tersebut merupakan peluang yang belum dimanfaatkan atau justru menjadi indikasi munculnya beban demografi baru.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis kuantitatif berbasis data makro, sehingga belum banyak menggali pengalaman subjektif lulusan dalam menghadapi transisi menuju dunia kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengombinasikan analisis data statistik dan pengalaman empiris melalui penyebaran kuesioner, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan strategi kebijakan yang mampu mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia secara berkelanjutan.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengangguran lulusan pendidikan di berbagai jenjang, yakni SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Indonesia, dalam konteks bonus demografi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh individu yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan kombinasi antara data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada para responden, sedangkan data pendukung dihimpun melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi berbagai literatur ilmiah, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, serta beragam data statistik lain yang relevan. Penggabungan kedua jenis data tersebut dilakukan untuk memperkuat hasil analisis serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, populasi yang dikaji meliputi SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Adapun sampel penelitian terdiri dari 15 responden yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu : 1) telah menyelesaikan pendidikan formal pada salah satu jenjang tersebut; 2) berada pada usia produktif, yakni antara 18 hingga 25 tahun; dan 3) berstatus sebagai pencari kerja atau belum memiliki pekerjaan.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden yang didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Secara umum, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua pendekatan yakni

berbasis probabilitas dan non-probabilitas. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, terdapat beragam metode sampling yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian (Febriyanti, 2023). Penelitian teknik purposive sampling dilakukan supaya data yang dikumpulkan dapat menggambarkan secara tepat karakteristik fenomena yang dikaji. Sementara itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner daring yang disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka. Kuesioner tersebut dirancang untuk menggali informasi mengenai latar belakang pendidikan responden, status pekerjaan, pengalaman dalam mencari kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, kuesioner juga mencakup pertanyaan terkait persepsi responden terhadap fenomena pengangguran terdidik di era bonus demografi, khususnya dalam menilai apakah kondisi tersebut merupakan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal atau justru berpotensi menjadi beban demografi di masa mendatang.

Validitas data pada penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan cara membandingkan berbagai informasi yang diperoleh melalui kuesioner, hasil kajian pustaka, serta data statistik yang relevan. Proses penelitian kemudian dilakukan melalui berbagai tahapan, yakni 1) diawali dengan pelaksanaan studi literatur untuk menyusun kerangka konseptual; 2) merancang instrumen penelitian; 3) menyebarkan kuesioner daring kepada responden; 4) mengumpulkan dan mengolah data; 5) menganalisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif; serta 6) menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, di antaranya dengan memperoleh persetujuan dari responden serta menjamin bahwa data yang diperoleh diperuntukkan hanya bagi kebutuhan akademis.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kondisi dan Karakteristik serta Faktor Penyebab Pengangguran Terdidik di Indonesia pada Era Bonus Demografi Berdasarkan Sumber BPS Dan Hasil Wawancara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015–2025, tingkat pengangguran terdidik di Indonesia cenderung stabil namun tetap berada pada level yang cukup tinggi, terutama pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Lulusan SMK secara konsisten mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi, dengan puncak pada tahun 2020 sebesar 13,55% akibat kontraksi ekonomi selama pandemi COVID-19. Meskipun mengalami penurunan pascapandemi, pada tahun 2025 angkanya masih relatif tinggi, yakni 8,63%. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan struktural, khususnya ketidaksesuaian antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

Dalam perspektif human capital theory, pendidikan dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja individu. Namun, tingginya pengangguran pada lulusan SMK menunjukkan bahwa investasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan adanya skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Hasil survei memperkuat temuan tersebut, di mana lulusan SMK menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat upah, tingginya tuntutan pekerjaan, serta minimnya pengalaman kerja (ZF; CNB; SW). Salah satu informan bahkan menyebutkan bahwa banyak lowongan pekerjaan menawarkan jam kerja yang tinggi dengan upah di bawah UMR (ZF, 2025), yang mencerminkan belum optimalnya nilai ekonomi dari human capital yang dimiliki.

Pada lulusan SMA, tingkat pengangguran menunjukkan kecenderungan menurun dari 10,27% pada tahun 2015 menjadi 6,88% pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi. Namun demikian, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja. Lulusan SMA umumnya memiliki keterampilan yang bersifat umum dan relatif fleksibel, tetapi belum memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar kerja. Hal ini tercermin dari dominasi pembelajaran yang masih berorientasi pada teori serta terbatasnya penguasaan keterampilan praktis (L; AR; DW; KMS;

ZA; AI; CA; ZRA; DM). Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran lebih banyak menitikberatkan pada teori dibandingkan praktik (DW, 2025) sama dengan temuan Yuliani et al. (2025), yang menegaskan bahwa ketidaksesuaian keterampilan dan minimnya sertifikasi menjadi faktor utama yang menghambat lulusan SLTA dalam bersaing di dunia kerja. Selain itu, kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan kurang siap menghadapi tuntutan industri. Keterbatasan biaya untuk mengikuti pelatihan tambahan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi (AR).

Pada jenjang pendidikan tinggi, tingkat pengangguran lulusan diploma dan universitas cenderung bersifat fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020, serta tidak selalu lebih rendah pada lulusan universitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin terserapnya tenaga kerja, sekaligus memunculkan fenomena *overeducation*, yaitu situasi ketika tingkat pendidikan individu melebihi kebutuhan pekerjaan akibat ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan permintaan industri (Roespita & Ismiyati, 2023). Menurut *human capital theory*, pendidikan tidak selalu meningkatkan peluang kerja karena adanya *skill mismatch*, dan dampaknya terhadap ekonomi bergantung pada kualitas pendidikan serta kondisi struktural (Lubis et al., 2025).

Kelompok berpendidikan rendah cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih rendah, namun sebagian besar bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan perlindungan kerja terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya *human capital* tidak menghambat akses kerja, tetapi berdampak pada kualitas pekerjaan yang rendah (Arum et al., 2023). Secara spasial, pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, karena masyarakat berpendidikan tinggi di kota cenderung lebih selektif, sedangkan di desa lebih fleksibel dalam menerima pekerjaan (Zulfikar et al., 2024). Lonjakan pengangguran pada tahun 2020 juga menegaskan bahwa pengangguran terdidik rentan terhadap guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 (Muhyidin, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran dipengaruhi tidak hanya oleh faktor individual, tetapi juga faktor struktural yang lebih luas. Dalam perspektif teori *bonus demografi*, hal tersebut mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan usia produktif, di mana potensi besar yang ada belum sepenuhnya terwujud akibat rendahnya kualitas dan relevansi *human capital* (Bloom & Williamson, 1998; Ardhana et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga oleh sistem pendidikan yang masih berorientasi pada penciptaan pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan Maryanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi cenderung berperan sebagai pencari kerja dengan keterbatasan keahlian, karena proses pendidikan lebih menekankan transfer pengetahuan dibandingkan penerapannya. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya penguasaan *soft skills* semakin memperkuat ketidaksiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Selain itu, pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh kecenderungan memilih pekerjaan di sektor formal, ketidaksesuaian antara karakteristik lulusan dan peluang kerja, serta meningkatnya ekspektasi terhadap pekerjaan yang aman dan stabil (Yuliasari, 2018). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya daya serap sektor formal, belum optimalnya pasar tenaga kerja, rendahnya kualitas lulusan, serta ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, kecenderungan menggantungkan harapan pada pekerjaan sebagai CPNS turut memperburuk situasi. Fenomena tersebut memunculkan *waiting unemployment*, yaitu kondisi ketika individu menunda bekerja karena ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan Ode (2022) yang menyatakan bahwa lamanya masa pencarian kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, terutama pada kelompok usia muda yang umumnya memiliki pengalaman terbatas, idealisme tinggi, dan belum memiliki tekanan ekonomi, sehingga cenderung memperpanjang waktu dalam mencari pekerjaan.

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan (SN; ZRA) yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan masih lebih berorientasi pada aspek teoritis dibandingkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Sejalan dengan Teori Collins, keterampilan kerja pada dasarnya lebih banyak diperoleh melalui pengalaman praktis dibandingkan melalui pendidikan formal, sementara sistem kredensial cenderung mendorong perolehan gelar yang belum tentu memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pasar kerja (Azizah & Achdiani, 2025). Di sisi lain, efektivitas program magang juga masih tergolong terbatas (Rofiq et al., 2020). Meskipun dalam beberapa kasus dinilai cukup relevan (ZF), implementasinya sering kali bersifat sederhana (CN) dan belum mampu secara signifikan meningkatkan daya saing lulusan (SW). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan human capital masih belum berjalan secara optimal.

Fenomena ini berkaitan dengan overeducation, yaitu kondisi ketika tingkat pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga mencerminkan inefisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja serta rendahnya return dari investasi pendidikan (Roespita & Ismiyati, 2023). Dalam perspektif human capital theory, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan produktivitas ekonomi yang optimal. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang mengindikasikan bahwa sistem pendidikan masih didominasi oleh pendekatan teoritis (DW), metode pembelajaran yang cenderung tradisional (Annur et al., 2024), serta belum optimalnya pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri (ZRA). Akibatnya, muncul kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, termasuk dalam aspek penguasaan teknologi dan kesiapan mental (ZF; SN).

Dengan demikian, karakteristik utama pengangguran terdidik di Indonesia meliputi dominasi pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi, tingginya kerentanan terhadap guncangan ekonomi, serta lemahnya keterkaitan antara sistem pendidikan dan penyerapan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor penyebabnya mencakup skill mismatch, keterbatasan lapangan kerja, tingginya ekspektasi lulusan, hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja, serta belum optimalnya sistem pendidikan dalam membentuk human capital yang relevan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi belum dimanfaatkan secara maksimal dan berpotensi berubah menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas keterampilan serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

## **2. Keterkaitan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja dalam konteks munculnya pengangguran terdidik**

Ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan pasar kerja menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka pengangguran terdidik pada era bonus demografi. Aini et al. (2025) menyatakan bahwa persoalan mendasar tersebut berakar pada adanya gap antara keterampilan yang diberikan oleh institusi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Secara umum, lulusan lebih banyak dibekali pengetahuan yang bersifat teoritis, sementara dunia kerja menuntut keterampilan praktis serta penguasaan soft skills. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil survei, informan 4 (DW) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan saat ini masih kurang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, karena pembelajaran lebih menekankan teori dibandingkan praktik. Kritik serupa juga disampaikan oleh Informan 3 (AR), yang menilai bahwa meskipun kurikulum sering mengalami perubahan, tetap belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Informan 5 (KMS) menambahkan bahwa perubahan kurikulum yang terus-menerus justru menyulitkan proses penyesuaian dengan tuntutan industri. Sementara itu, Informan 7 (SN) menilai bahwa kurikulum belum sepenuhnya relevan karena dominasi teori masih lebih besar dibandingkan praktik lapangan. Pandangan ini sejalan dengan Informan 11 (ZRA) yang menilai tingkat kesesuaian masih rendah, serta Informan 12 (DM) yang menyebutkan bahwa kurikulum SMA lebih berorientasi pada

pendidikan umum dan persiapan melanjutkan studi, bukan pada kesiapan kerja secara langsung.

Selain itu, penelitian Ardhana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa institusi pendidikan di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada aspek akademik, sehingga lulusan belum menguasai kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, seperti penguasaan teknologi modern dan kemampuan komunikasi. Kondisi ini pada akhirnya menjadi salah satu hambatan dalam proses penyerapan tenaga kerja.

Keterbatasan sistem pendidikan dalam menyediakan pengalaman praktik juga menjadi perhatian penting. Informan 1 (L) menyatakan belum pernah memperoleh pengalaman praktik yang relevan, sementara Informan 3 (AR) juga mengaku tidak memiliki pengalaman magang. Hal serupa disampaikan oleh Informan 4 (DW) yang menyebutkan bahwa selama menempuh pendidikan di SMA, ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan praktik, apalagi magang. Informan 8 (ZA), Informan 9 (AI), dan Informan 11 (ZRA) juga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mengikuti program magang. Sementara itu, Informan 12 (DM) hanya memiliki pengalaman praktikum terbatas di laboratorium sekolah. Bahkan, keterbatasan ini juga dirasakan oleh lulusan SMK, sebagaimana diungkapkan oleh Informan 15 (CN) dan Informan 13 (SW), yang menunjukkan bahwa pendidikan vokasi pun belum sepenuhnya mampu memberikan pengalaman praktik yang memadai.

Padahal, sistem pendidikan berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap terjun langsung ke dunia kerja secara langsung. Namun, berbagai kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pembelajaran di pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan Kompas (2026) menyoroti bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih lebih berfokus pada peningkatan jumlah peserta didik, dibandingkan dengan mempertimbangkan prospek kerja lulusan. Akibatnya, banyak lulusan yang memiliki kemampuan yang belum selaras dengan tuntutan dunia kerja (Rizky, 2026). Selain itu, artikel berjudul "*Indonesia's Struggle with Education Inequality: Is Reform the Answer?*" mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan struktural meskipun telah dilakukan berbagai reformasi dan investasi. Perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi, masih sangat terlihat. Ketimpangan ini disebabkan oleh distribusi tenaga pendidik yang tidak merata serta keterbatasan fasilitas pendidikan, sehingga banyak peserta didik di daerah tidak memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas (Sidauruk et al., 2025). Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada kualitas lulusan dan memperlebar kesenjangan daya saing dalam dunia kerja. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa lulusan dari daerah tertentu menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas praktik, pelatihan, serta informasi terkait dunia kerja dibandingkan dengan lulusan dari wilayah perkotaan. Kondisi ini pada akhirnya memperkecil peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan (Informan 5 (KMS)).

Temuan empiris tersebut sejalan dengan hasil *systematic literature review* yang dilakukan oleh Muchtar et al. (2024) dalam penelitian berjudul "*Systematic Literature Review: Examining Indonesia's Educational Inequality Factors and Government Equality Policies.*" Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, serta hambatan sosial-ekonomi menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal. Akibatnya, lulusan dari wilayah tersebut cenderung menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengembangkan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pernyataan ini turut diperkuat oleh temuan Annur et al. (2024), yang mengungkapkan bahwa metode pembelajaran di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan tradisional seperti ceramah dan diskusi kelas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.

Selain ketimpangan akses pendidikan, permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi ketenagakerjaan adalah kurikulum yang masih kaku dan kurang adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri. Dalam berbagai kasus, materi pembelajaran di sekolah maupun perguruan

tinggi tidak mengalami pembaruan yang berarti dalam jangka waktu yang panjang, sehingga belum mampu menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan di sektor industri dan teknologi. Penelitian UNESCO yang dikutip oleh Yanti dan Zahri (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan komponen-komponen penting dalam Revolusi Industri 4.0, seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data, internet of things (IoT), serta otomatisasi.

Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa banyak lulusan merasa belum memiliki keterampilan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Akibatnya, setelah menyelesaikan pendidikan, mereka masih perlu melakukan pembelajaran mandiri untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja (Informan 2 (ZF); Informan 4 (DW)).

Dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi, diperlukan strategi untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan dan peluang kerja. Pembaruan kurikulum, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, perlu diarahkan pada pendekatan pembelajaran proyek serta penguatan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia industri. Kemampuan beradaptasi, semangat kewirausahaan, literasi digital, serta penguasaan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) merupakan aspek-aspek yang perlu diprioritaskan. Selain itu, revitalisasi pendidikan vokasi juga menjadi langkah penting melalui peningkatan fasilitas pembelajaran, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta penerapan kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia industri (Aini et al., 2025).

Rekomendasi tersebut sejalan dengan pandangan para informan yang menekankan pentingnya penyediaan program magang yang berkualitas, pelatihan keterampilan praktis, serta penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri guna meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja (Informan 1 (L); Informan 5 (KMS)).

Jika ditinjau dari perspektif Teori Struktural Fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (1951), kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk disfungsi dalam sistem sosial. Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan (equilibrium). Dalam kerangka tersebut, setiap subsistem memiliki fungsi tertentu dalam memenuhi prasyarat fungsional (AGIL), yang terdiri dari adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, serta pemeliharaan pola. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai subsistem yang bertugas mempersiapkan individu agar mampu berperan secara efektif dalam subsistem ekonomi, khususnya dalam pasar kerja.

Ketika hasil keluaran sistem pendidikan tidak selaras dengan tuntutan pasar tenaga kerja, maka fungsi adaptasi dan integrasi dalam sistem nasional menjadi tidak berjalan secara optimal, sehingga mengganggu keseimbangan secara keseluruhan. Dampaknya terlihat pada munculnya berbagai permasalahan sosial, seperti pengangguran, yang berpotensi mengancam stabilitas sosial. Ketidakmampuan institusi pendidikan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan di subsistem industri menunjukkan adanya disfungsi institusional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 7 (SN) yang menyebutkan bahwa *"teori di kampus sering tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi di dunia kerja,"* yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara subsistem pendidikan dan subsistem industri dalam sistem sosial.

### **3. Dampak pengangguran di kalangan tenaga kerja berpendidikan terhadap pemanfaatan bonus demografi di Indonesia.**

Bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Dalam situasi ideal, kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, tabungan, investasi, dan konsumsi. Namun, bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan berpendidikan, berdampak langsung pada melemahnya peran bonus demografi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor utama dalam konsumsi, tabungan, dan investasi

tidak dapat berkontribusi secara optimal apabila tidak terserap dalam pasar kerja. Akibatnya, daya beli masyarakat cenderung menurun, laju investasi melambat, dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat berkembang secara maksimal (Melo et al., 2024).

Temuan teoritis tersebut sejalan dengan realitas empiris di lapangan. Dampak ekonomi dari pengangguran terdidik dirasakan secara langsung oleh para informan. Hasil survei menunjukkan bahwa lulusan usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan masih bergantung pada dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kontribusi ekonomi mereka terhadap rumah tangga belum optimal (Informan 1 (L) dan Informan 4 (DW)). Informan 1 (L) menyatakan bahwa pengangguran terdidik justru menjadi beban ekonomi bagi keluarga karena potensi kerja yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal serupa diungkapkan oleh Informan 3 (AR) yang merasa keberadaannya cenderung menambah beban keluarga karena berada pada usia produktif namun belum memiliki pekerjaan. Sementara itu, Informan 4 (DW) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan pendapatan, meningkatnya ketergantungan ekonomi, serta tertundanya kemandirian finansial. Dampak ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga dalam jangka menengah hingga panjang. Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan Informan 5 (KMS), Informan 8 (ZA), serta Informan 11 (ZRA) dan Informan 12 (DM), yang menyatakan bahwa mereka masih bergantung pada orang tua akibat belum memiliki penghasilan tetap.

Pengangguran terdidik tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan psikologis, serta berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan, ia kehilangan salah satu peran sosial utama sebagai aktor produktif dalam masyarakat. Kondisi ini dapat memicu krisis identitas, menurunkan rasa percaya diri, dan dalam banyak kasus menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi menganggur dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan perasaan rendah diri, ketidakamanan (insecurity), serta melemahnya motivasi untuk mengembangkan potensi diri (Informan 2 (ZF) dan Informan 3 (AR)). Temuan ini sejalan dengan Koli et al. (2025) yang menyatakan bahwa ketiadaan pekerjaan menyebabkan individu tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, sehingga memicu tekanan psikologis, hilangnya rasa berharga, serta tujuan hidup, terutama pada generasi muda yang berada dalam fase pencarian identitas. Informan 2 (ZF) juga mengungkapkan bahwa kondisi pengangguran berdampak pada menurunnya motivasi dan kepercayaan diri, serta menimbulkan rasa malu yang mendorong individu untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Sementara itu, Informan 3 (AR) mengalami perasaan minder secara berkelanjutan. Dampak ini turut diperkuat oleh Informan 4 (DW) yang menyoroti tekanan mental akibat ketidakpastian masa depan, Informan 5 (KMS) yang menekankan munculnya rasa tidak aman dan kesenjangan sosial, serta Informan 7 (SN) yang menambahkan adanya risiko stres, penurunan motivasi, dan kecenderungan isolasi sosial akibat stigma negatif. Selain itu, tekanan dari keluarga dan lingkungan juga dirasakan oleh Informan 8 (ZA), Informan 9 (AI), dan Informan 10 (CA). Informan 12 (DM) bahkan mengungkapkan perasaan rendah diri ketika membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang telah bekerja. Secara keseluruhan, dampak psikologis tersebut berkontribusi pada menurunnya motivasi individu untuk mengembangkan keterampilan dan beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja, sehingga berpotensi menciptakan lingkaran pengangguran terdidik yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Teori Human Capital Becker (1993), kondisi ini mencerminkan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan investasi pendidikan, di mana individu cenderung kehilangan dorongan untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) maupun menyesuaikan kompetensi (reskilling). Akibatnya, bonus demografi tidak hanya gagal dimanfaatkan secara optimal, tetapi juga berpotensi berubah menjadi beban demografi baru. Fenomena ini tercermin dalam kondisi vertical educational mismatch atau overeducation, yaitu ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dimiliki individu dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Penelitian oleh Hakim dan Fitri (2025) dalam studi berjudul *“Does Vertical Educational Mismatch Hinder*

*Economic Growth?: Evidence from Indonesia*” menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk inefisiensi dalam pemanfaatan human capital yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan output yang optimal karena adanya *underutilization of skills* di dunia kerja. Dalam kondisi demikian, individu berpotensi mengalami penurunan pemanfaatan kompetensi yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat melemahkan insentif untuk terus mengembangkan keterampilan lanjutan.

Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dapat membuat bonus demografi berubah menjadi beban sosial. Apabila situasi ini tidak direspons melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif, seperti reformasi kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, serta penguatan pelatihan berbasis keterampilan, maka Indonesia berisiko gagal memanfaatkan momentum penting dalam meningkatkan daya saing nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial (Aini et al., 2025). Hasil survei yang melibatkan Informan 1 (L) dan Informan 5 (KMS) turut menegaskan bahwa tanpa adanya perluasan lapangan kerja yang relevan serta kebijakan yang mendukung lulusan baru, tenaga kerja terdidik justru berpotensi menjadi beban ekonomi, baik bagi keluarga maupun negara.

#### **4. Pengangguran Terdidik Apakah Peluang Terabaikan atau Indikasi Beban Demografi Baru?**

Di tengah dominasi penduduk usia produktif di Indonesia, tingginya tingkat pengangguran pada kelompok berpendidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi bonus demografi dan realitas pasar kerja saat ini. Secara Konseptual, bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia kerja dibandingkan kelompok usia di luar angkatan kerja, sehingga membuka kesempatan untuk mendorong peningkatan laju perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya manusia dalam angkatan kerja secara optimal (Sulistiawati, 2021). Kondisi ini akan menjadi keuntungan apabila angkatan kerja usia produktif dapat terserap dengan baik di sektor ketenagakerjaan pada skala domestik maupun internasional (Yunita, 2017). Namun, bonus demografi juga berpotensi berubah menjadi beban apabila peningkatan populasi usia produktif tidak dibarengi dengan tersedianya kesempatan kerja, kualitas pendidikan yang mencukupi dan sesuai kebutuhan, serta kesesuaian keterampilan angkatan kerja dengan tuntutan sektor industri (Falikhah, 2017). Oleh karena itu, optimalisasi bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, serta arah kebijakan pembangunan nasional.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan krusial mengenai apakah dominasi penduduk usia produktif benar-benar dapat menjadi modal sosial-ekonomi yang menguntungkan, atau justru mencerminkan tekanan struktural baru yang perlu diantisipasi.

Dalam perspektif yang lebih optimis, pengangguran di kalangan terdidik tidak semata-mata dipandang sebagai permasalahan, melainkan sebagai potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lulusan perguruan tinggi pada umumnya memiliki kapasitas intelektual, kemampuan adaptasi, serta pengetahuan yang dapat mendorong tumbuhnya kewirausahaan, inovasi, dan peningkatan produktivitas, terutama apabila didukung oleh kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Sejalan dengan itu, penelitian Abdillah (2024) mengindikasikan bahwa perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program, seperti magang atau praktik kerja, proyek pengabdian di desa, kegiatan mengajar di sekolah, penelitian, kewirausahaan mahasiswa, hingga proyek atau studio independen. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional. Khususnya dalam upaya mencetak lulusan yang kompetitif serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi menjadi salah satu pilar utama pendidikan yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Para informan menunjukkan adanya variasi pandangan dalam memaknai fenomena pengangguran terdidik. Sebagian besar melihatnya sebagai “peluang yang belum dimanfaatkan

secara optimal” (Informan 2/ZF, 5/KMS, 6/CNB, 8/ZRA), dengan menekankan adanya potensi laten seperti kreativitas, kemampuan digital, serta kapasitas intelektual yang masih dapat dikembangkan menjadi investasi yang tepat. Di sisi lain, terdapat informan yang memandangnya sebagai “beban demografi baru” (Informan 1/L, 3/AR) karena tenaga kerja usia produktif belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal. Namun demikian, mayoritas informan menilai bahwa fenomena ini bersifat kontekstual (Informan 4/DW, 7/SN, 9/AI, 10/CA, 12), sehingga dapat menjadi peluang maupun beban tergantung pada bagaimana penanganannya.

Hasil survei menunjukkan bahwa peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, melalui program magang, pelatihan keterampilan, serta kolaborasi dengan industri, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi lulusan (Informan 1/L, 4/DW). Sebaliknya, apabila permasalahan struktural tidak segera ditangani, pengangguran terdidik berpotensi menambah beban ekonomi, meningkatkan ketergantungan pada keluarga (Informan 3/AR, 5/KMS), serta mengarahkan lulusan untuk bekerja pada bidang yang tidak selaras dengan kompetensi yang dimiliki (Informan 2/ZF).

Di sisi lain, beberapa informan memandang fenomena ini sebagai “*beban demografi baru*” (Informan 1,3). Informan 1 (L) secara tegas menyatakan bahwa pengangguran terdidik saat ini merupakan bentuk beban demografi yang baru. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Informan 3 (AR) yang menyampaikan bahwa “*kondisi saat ini menurut saya lebih tepat dikategorikan sebagai beban demografi, karena tenaga kerja usia produktif belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan.*”

Namun demikian, pandangan yang paling komprehensif justru datang dari sejumlah informan yang melihat fenomena ini sebagai dua sisi yang bersifat kontekstual atau situasional (Informan 4, 7, 9, 10, 12). Informan 4 (DW) menyatakan bahwa pengangguran terdidik dapat dipahami sekaligus sebagai potensi yang belum dimanfaatkan dan sebagai beban demografi baru. Ia menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang mampu menyerap serta mengembangkan kompetensi lulusan, potensi tersebut tidak akan optimal dan justru berisiko menimbulkan tekanan sosial maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, Informan 7 (SN) berpendapat bahwa “*Fenomena ini akan menjadi beban apabila tidak ditangani dengan baik.*” Sementara itu, Informan 9 (AI) berpendapat bahwa “*Mereka, saat ini sebagai peluang yang tertunda, yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan apabila segera terserap dalam pasar kerja.*” Informan 10 (CA) juga menekankan bahwa posisi pengangguran terdidik sebagai beban atau peluang sangat bergantung pada bagaimana penanganannya. Hal serupa disampaikan kembali oleh Informan 4 (SW) yang menyatakan bahwa “*Kondisi ini menurut saya dapat menjadi keduanya. Dapat menjadi beban apabila tidak dimanfaatkan secara optimal, namun dapat menjadi peluang jika didukung melalui pelatihan dan penyediaan kesempatan kerja.*”

Pengangguran terdidik pada dasarnya memiliki peluang untuk diubah menjadi aset strategis bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui kebijakan yang menekankan keterkaitan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, serta penguatan pelatihan keterampilan yang selaras dengan permintaan pasar kerja. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang menyelaraskan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan sektor industri dapat meningkatkan kompetensi lulusan sekaligus kesiapan mereka untuk memasuki pasar kerja (Ningrum, 2025). Selain itu, penyesuaian kurikulum pendidikan kejuruan secara sistematis dengan kebutuhan pasar kerja terbukti mampu meningkatkan kualitas susulan serta memperluas peluang mereka dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan bidang keahlian yang dimiliki (Rohmawati et al., 2025). Temuan ini juga didukung oleh hasil survei yang menegaskan pentingnya penyediaan program magang yang berkualitas, pelatihan keterampilan praktis, serta penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri agar potensi lulusan dapat dioptimalkan (Informan 1 (L); Informan 4 (DW)). Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan pengangguran terdidik tidak hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai potensi pembangunan yang memerlukan pengelolaan kebijakan secara efektif.

Di sisi lain, pengangguran terdidik juga dapat mencerminkan munculnya beban demografi baru apabila berbagai permasalahan struktural tidak dapat ditangani secara komprehensif. Pada tingkat makro, ketidakmampuan menyerap penduduk usia produktif ke dalam aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, baik bagi rumah tangga maupun negara. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketergantungan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, serta potensi bertambahnya beban fiskal pemerintah dalam membiayai program perlindungan sosial di masa depan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan dunia kerja tidak hanya menghambat pemanfaatan bonus demografi, tetapi juga meningkatkan risiko ketimpangan sosial, bahkan sebelum Indonesia memasuki fase penuaan penduduk (Sawitri & Widarani, 2025). Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa pengangguran jangka panjang mendorong meningkatnya ketergantungan lulusan terhadap keluarga, sehingga menambah beban ekonomi rumah tangga (Informan 3 (AR); Informan 5 (KMS)).

Dalam perspektif dependency ratio yang diperluas, dominasi penduduk usia produktif tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas ekonomi, terutama ketika sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal, dengan jam kerja yang tidak penuh, atau menekuni pekerjaan yang tidak selaras dengan keahlian yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan kontribusi ekonomi yang dihasilkan relatif rendah, sekaligus meningkatkan beban sosial secara keseluruhan (The Jakarta Post, 2025). Sejalan dengan itu, penelitian Utami dan Armelly (2023) menunjukkan bahwa faktor demografi, termasuk dependency ratio, turut mempengaruhi tingkat pengangguran. Hal ini juga didukung oleh temuan hasil survei yang mengungkapkan bahwa sebagian lulusan terdidik terpaksa bekerja pada pekerjaan tidak tetap atau di luar bidang keahliannya sebagai strategi bertahan hidup, meskipun kontribusi produktif yang dihasilkan masih belum optimal (Informan 2 (ZF)).

Dari perspektif teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya dualitas antara peluang dan ancaman dalam pemanfaatan bonus demografi. Konsep bonus demografi yang diperkenalkan oleh Bloom dan Williamson (1998) menjelaskan bahwa peluang muncul ketika rasio ketergantungan menurun, sehingga jumlah penduduk usia produktif meningkat, dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, peluang tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang efektif, seperti peningkatan mutu pendidikan serta perluasan kesempatan kerja yang selaras dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, Teori Modal Manusia sebagaimana diungkapkan oleh Becker (1993) menekankan bahwa investasi terhadap pendidikan, pelatihan, serta kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas individu. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia dalam angkatan kerja menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja menunjukkan bahwa investasi pada modal manusia masih belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Teori Pengangguran Struktural yang diperkenalkan oleh Beveridge (1944) menguraikan bahwa pengangguran disebabkan oleh ketidakcocokan antara kompetensi tenaga kerja dan tuntutan dunia kerja. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal. Apabila persoalan struktural tersebut tidak hanya akan berkurang, tetapi juga berisiko berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Struktural Fungsionalisme dari Parsons (1951), masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi dan harus memenuhi prasyarat fungsional tertentu, sebagaimana tercermin dalam skema AGIL yang meliputi penyesuaian terhadap lingkungan, perolehan tujuan, keterpaduan antar bagian, serta pemeliharaan pola nilai yang tersembunyi. Ketika lembaga pendidikan sebagai salah satu subsistem tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang relevan, dan subsistem ekonomi gagal menyerap lulusan yang tersedia, maka kondisi tersebut

menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan.

Fenomena ini tidak sekedar bersifat konseptual, tetapi juga tampak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1 (L) dan Informan 3 (AR), yang menyatakan bahwa pengangguran terdidik turut meningkatkan beban sosial dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi dapat berdampak langsung pada kehidupan individu, sekaligus membuka peluang munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, pengangguran terdidik menempatkan Indonesia pada posisi dilematis antara potensi bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman munculnya beban demografi baru. Ketidaksiharian antara sistem pendidikan dan tuntutan pasar kerja semakin memperbesar tekanan sosial dan ekonomi, serta menghambat optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja produktif.

Pada saat yang bersamaan, bonus demografi merupakan peluang strategis yang bersifat terbatas dan hanya terjadi sekali, serta menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu lepas dari jebakan pendapatan menengah menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa kesiapan kualitas generasi muda terutama dalam aspek keterampilan, kesesuaian kompetensi, dan pemahaman terhadap peran ekonomi, bonus demografi justru berpotensi bertransformasi menjadi permasalahan serius seperti meningkatnya angka pengangguran dan terhambatnya pembangunan (Wibowo et al., 2026).

Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensional yang tidak hanya berfokus pada jumlah populasi usia produktif, tetapi juga mencakup pada penguatan berbagai aspek seperti peningkatan kualitas pendidikan, keselarasan keahlian dengan kebutuhan industri, serta penguatan hubungan antara sistem pendidikan dan pasar kerja.

## **5. Strategi dan Kebijakan untuk mengurangi Pengangguran Terdidik**

Berbagai strategi dan kebijakan dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena pengangguran terdidik. Pandangan para informan dalam penelitian ini juga menunjukkan kesamaan dengan rekomendasi yang diajukan oleh para pakar..

### **a. Menyempurnakan Sistem Pendidikan**

Sistem pendidikan yang belum berjalan optimal cenderung menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pembenahan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek teoritis dan praktis, sehingga peserta didik memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan profesional yang memadai, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus menekan angka pengangguran (Lusiana et al., 2024).

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran krusial dalam menyiapkan tenaga kerja menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Upaya ini perlu didukung oleh pemerataan akses pendidikan berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman (Satyahadewi et al., 2023). Mayoritas informan menekankan pentingnya reformasi pendidikan melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, penguatan keterampilan teknis (hard skills) dan non-teknis (soft skills), peningkatan literasi digital, serta penyediaan pengalaman kerja seperti program magang. Selain itu, pengembangan kewirausahaan dan inovasi juga dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dinamika pasar kerja.

Kemudian, pemerintah perlu memastikan keselarasan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, misalnya melalui integrasi keterampilan berbasis teknologi serta kemampuan analisis dan interpretasi data ke dalam kurikulum pendidikan. Penguatan pendidikan vokasi, termasuk pada jenjang SMK dan politeknik, menjadi langkah strategis untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja (Aini et al., 2025). Di sisi lain, peningkatan kualitas program pelatihan serta perluasan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil melalui

penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **b. Menyediakan data lowongan pekerjaan secara tepat dan terbuka**

Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam menyediakan informasi lowongan pekerjaan secara akurat dan terbuka melalui berbagai media. Upaya ini bertujuan untuk mempermudah pencari kerja, khususnya lulusan pendidikan tinggi, dalam mengakses peluang kerja yang tersedia. Di samping itu, pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan sebagai penghasil lulusan dan sektor industri sebagai pengguna tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran strategis sebagai penghubung (intermediator) antara institusi pendidikan dan dunia industri.

Sejumlah informan turut menegaskan pentingnya peran tersebut. Informan 1 (L) mengusulkan perlunya fasilitasi program pemagangan nasional. Informan 2 (ZF) menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan yang mampu memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan sektor industri. Informan 3 (AR) mengharapkan adanya program bantuan untuk mempermudah akses terhadap pekerjaan. Informan 5 (KMS) menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyediakan ruang bagi lulusan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sekaligus memperluas ketersediaan lapangan kerja. Informan 7 (SN) menyarankan agar pemerintah berperan sebagai penghubung regulatif antara kurikulum pendidikan dan standar industri. Informan 9 (AI) menyoroti pentingnya pengembangan platform bursa kerja berbasis keahlian guna meningkatkan nilai tambah bagi lulusan baru. Sementara itu, Informan 12 (DW) juga menekankan perlunya keterlibatan perusahaan melalui program magang, pelatihan, serta penyediaan informasi lowongan kerja. Keseluruhan pandangan tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran krusial sebagai perantara yang menjembatani hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja.

#### **c. Memberikan Lapangan Pekerjaan Yang Berkualitas Perdalam**

Penduduk usia produktif memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan investasi pada sektor industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM dan perluasan peluang kewirausahaan. Upaya ini dapat didukung melalui pelatihan berbasis masyarakat, seperti pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan industri rumahan. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, tetapi juga membantu menekan angka pengangguran terdidik (Zulkifli, 2022).

Selain itu, pengembangan lapangan kerja berbasis inovasi dan ekonomi digital juga dipandang sebagai strategi yang efektif. Pendekatan ini mampu membuka peluang kerja baru yang lebih fleksibel, mendorong proses peningkatan keterampilan (reskilling), serta mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi teknologi dan kreativitas yang dimiliki oleh tenaga kerja terdidik. Sektor digital dan industri rintisan (startup) memiliki potensi besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM perlu terus diperkuat melalui kemudahan akses permodalan, perluasan jaringan pasar, serta jaminan keberlangsungan dan keamanan usaha. Hal ini penting agar UMKM dapat berkontribusi secara optimal dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif juga menjadi aspek penting, yang dapat diwujudkan melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, harmonisasi regulasi, serta penyediaan jaminan sosial bagi pekerja. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah memperluas akses terhadap pelatihan kerja serta mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis (hard skills) dan non-teknis (soft skills) sebagai prioritas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja (Aini et al., 2025).

#### **d. Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Tenaga Kerja**

Pemanfaatan bonus demografi tidak hanya bergantung pada besarnya jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada tingkat produktivitasnya. Produktivitas ini tercermin dari kemampuan individu dalam menghasilkan pendapatan, baik melalui pekerjaan formal, usaha mandiri, maupun investasi. Hal ini sejalan dengan temuan Sulistyawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan, tingkat upah, dan investasi berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa lulusan terdidik yang belum terserap di dunia kerja belum mampu berkontribusi optimal terhadap pendapatan rumah tangga, sehingga potensi usia produktif belum dimanfaatkan secara maksimal (Informan 1 (L), Informan 3 (AR)).

Dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan antara tingkat upah dan pengangguran bersifat dinamis dan kompleks. Peningkatan upah di satu sisi dapat meningkatkan biaya produksi yang berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja, sehingga memicu peningkatan pengangguran. Namun di sisi lain, upah yang lebih tinggi juga dapat menarik berbagai individu untuk masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja (Guritno & Muljaningsih, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan (upskilling), dan penyesuaian keterampilan (reskilling) menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja terdidik. Para informan sepakat bahwa program-program tersebut perlu diperluas serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama sebagai respons terhadap pesatnya kemajuan teknologi. Dengan demikian, tenaga kerja tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompleks..

#### **e. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja**

Keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki, terutama pada kelompok berpendidikan menengah (SMA/SMK), di mana perempuan cenderung lebih berisiko menjadi penganggur atau berada di luar angkatan kerja (Pratomo, 2017). Hal ini juga diperkuat dalam laporan Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020–2050 yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di pasar kerja tidak mengalami peningkatan signifikan pada periode 2018–2020, dengan kesenjangan yang cukup lebar dibandingkan laki-laki (Aini et al., 2025).

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kecenderungan perempuan untuk tidak terlibat dalam angkatan kerja akibat peran domestik, seperti mengurus rumah tangga, yang secara sosial lebih banyak dibebankan kepada perempuan (Pratomo, 2017). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Nursyamsiah et al. (2025) mengungkapkan bahwa norma gender tradisional serta tanggung jawab dalam pernikahan dan pengasuhan anak menjadi hambatan utama, meskipun tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan peluang kerja perempuan. Temuan serupa disampaikan oleh Lusiyanti & Padang Wicaksono (2020), yang menunjukkan bahwa status menikah dan keberadaan anak usia dini menurunkan kemungkinan perempuan untuk bekerja. Selain itu, studi kolaboratif Prospera, UI, Macalester College, ILO, dan UN Women (2025) menegaskan bahwa beban kerja domestik yang tidak dibayar, khususnya dalam pengasuhan anak, merupakan hambatan struktural yang signifikan. Kondisi ini semakin diperkuat oleh budaya patriarki serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender (Fardani et al., 2025). Pertiwi et al. (2025) juga menyoroti bahwa partisipasi perempuan paling rendah terjadi pada tingkat pendidikan menengah, meskipun dapat ditingkatkan melalui penguatan keterampilan digital. Dengan demikian, rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, beban domestik, serta keterbatasan akses terhadap keterampilan pendukung. Di sisi lain, meskipun partisipasi perempuan menunjukkan tren peningkatan, keterlibatan mereka masih didominasi pada sektor informal yang cenderung rentan, minim perlindungan kerja, dan memiliki keterbatasan dalam pengembangan karier jangka panjang (Aini et al., 2025).

Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan oleh informan laki-laki, isu ini tetap relevan secara makro dan tercermin dalam pengalaman informan perempuan. Dari total 15 informan, sebagian besar merupakan perempuan. Informan 5 (KMS), misalnya, yang bekerja paruh waktu menunjukkan bahwa perempuan tetap berupaya aktif mencari peluang kerja. Namun demikian, hambatan struktural sebagaimana dijelaskan oleh Pratomo (2017) dan Aini et al. (2025), seperti beban domestik dan dominasi di sektor informal, masih menjadi kendala utama bagi perempuan terdidik untuk memasuki sektor formal secara optimal. Informan 3 (AR) menghadapi kendala biaya dalam mengikuti kursus untuk mengembangkan karier di bidang fashion, sementara Informan (AN), lulusan SMK Kecantikan, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan terdidik masih menghadapi hambatan ganda, yaitu hambatan struktural dalam pasar kerja serta hambatan sosial-budaya. Padahal, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar peluang mereka untuk memasuki sektor kerja formal dan memperoleh pekerjaan yang lebih layak (Karunia & Pratama, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, khususnya melalui integrasi nilai kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan guna meningkatkan partisipasi kerja dan menekan pengangguran terdidik (Aini et al., 2025). Kebijakan yang responsif gender menjadi krusial untuk memastikan bahwa potensi tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memaksimalkan bonus demografi.

Dengan demikian, optimalisasi bonus demografi tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan sistem pelatihan, upskilling, dan reskilling yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan pengupahan, peningkatan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja produktif perlu dirancang secara terpadu agar penduduk usia produktif tidak hanya terserap secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga dan pembangunan nasional.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, hal ini bisa disimpulkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia dalam konteks bonus demografi merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Pertama, dari segi kondisi, karakteristik, dan faktor penyebab, pengangguran terdidik banyak terjadi pada lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Faktor utamanya meliputi ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), terbatasnya peluang kerja, tingginya ekspektasi terhadap jenis pekerjaan, serta hambatan struktural seperti kurangnya pengalaman kerja.

Kedua, dalam kaitannya dengan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Kurikulum pendidikan yang cenderung berorientasi pada aspek teoritis belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri yang menuntut keterampilan praktis serta soft skills, sehingga lulusan belum mampu terserap secara optimal di dunia kerja.

Ketiga, dari sisi dampak, pengangguran terdidik tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, seperti meningkatnya ketergantungan finansial dan rendahnya kontribusi terhadap produktivitas, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis, seperti munculnya stres, menurunnya rasa percaya diri, serta kecenderungan isolasi sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Keempat, fenomena ini menunjukkan kondisi yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pengangguran terdidik dapat menjadi potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal apabila didukung oleh kebijakan yang tepat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi berkembang menjadi beban demografi baru apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Kelima, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan sistem pendidikan, penyediaan informasi lowongan kerja yang transparan dan akurat, penciptaan lapangan kerja

yang berkualitas, peningkatan kapasitas serta produktivitas tenaga kerja, serta penguatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Dengan demikian, keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh sinergi antara sektor pendidikan, dunia kerja, dan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja terdidik secara berkelanjutan.

## E. Referensi

- Abdillah, F. (2024). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13-24.
- Achmad, W., Nurwati, N., Fedryansyah, M., Sumadinata, R. W. S., & Sidiq, R. S. S. (2024). Taking advantage of Indonesia's demographic bonus in 2024: Challenges and opportunities. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4425-4434.
- Aini, L., Manik, C. W., Ginting, H. N. B., Salsabila, S., & Hidayat, N. (2025). Analisis Bonus Demografi Ditengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 4(1), 86-96.
- Annur, S., Afriantoni, A., Azhari, I., & Haqqi, A. (2024). Sistem Pendidikan di Indonesia, Inggris, dan Finlandia: Sebuah Studi Perbandingan. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1634-1644.
- Ardhana, A. Y. A., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., & Gunawan, A. (2025). *Analisis Ketidaksiharian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia*. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(4), 1020-1026. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i4.156>
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik generasi z dan kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030. *Accounting student research journal*, 2(1), 59-72.
- Azizah, N. W. N., & Achdiani, Y. (2025). Analisis Kemiskinan di Perkotaan Terhadap Akses Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Generasi Muda. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 11(2).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Penduduk berkualitas menuju Indonesia emas: Kebijakan kependudukan Indonesia 2020-2050. Kementerian PPN/Bappenas. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Buku%20Penduduk%20Berualitas%20Menuju%20Indonesia%20Emas%20%20310522%20.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Penduduk%20Berualitas%20Menuju%20Indonesia%20Emas%20%20310522%20.pdf)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (30 Januari 2026). *Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2025*. Diakses pada 18 Februari 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan pekerja di Indonesia Agustus 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/assets/publication/2023/12/08/1b09be03a0951907a562f755/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2023.html>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press. (Teori human capital)
- Beveridge, W. H. (1944). *Full Employment in a Free Society*.
- Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia. *World Bank Economic Review*, 12(3), 419-455.
- Falikhah, N. (2017). Bonus demografi peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).
- Fardani, M., Putri, A., Ignasha, N., Farliana, N., & Chairunisa, N. A. (2025). Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Provinsi di Indonesia Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 22(1), 25-33.
- Febriyanti, B. N. (2023). Teknik pengambilan sampel. *Universitas Jambi*, 13(3), 1576-1580.
- Fitria, S. (2015). Analisis Pengangguran Terdidik Di Kota Pontianak. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 4(2).
- Guritno, S. U., & Muljaningsih, S. (2024). Pengaruh pendidikan, upah minimum dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 113-124.
- Hakim, D. R., & Fitri, E. N. (2025). Does Vertical Educational Mismatch Hinder Economic Growth?: Evidence from Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 14(3), 322-336.

- Karunia, A. M., & Pratama, A. M. (2022). Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar. Kompas Money. <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerjaperempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar>.
- Koli, Y. B., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Krisis Peran Sosial: Pengangguran Dan Gangguan Psikologis Dalam Struktur Masyarakat Modern. PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi, 5(2), 330-338.
- Kompas. (2026). Pengangguran Gen Z terdidik tinggi, CSIS sebut pendidikan belum jawab kebutuhan. <https://money.kompas.com/read/2026/01/08/130600026/pengangguran-gen-z-terdidik-tinggi-csis-sebut-pendidikan-belum-jawab-kebutuhan>
- La Ode, M. H. (2022). Durasi Mencari Kerja Bagi Pekerja Usia Muda di Indonesia: Job Search Duration of Youth Labor in Indonesia. In Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI) (Vol. 2, No. 2, pp. 118-128).
- Lubis, Z. H., Silaban, L. D. Y., Panjaitan, C. T., & Marpaung, O. D. (2025). Pengaruh Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1), 7115-7120.
- Lusiana, D., Qomar, M. B., & Setiadi, A. (2024). POTRET STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA: TINJAUAN STUDI LITERATUR. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 22-30.
- Lusiyanti, L., & Wicaksono, P. P. (2020). The impact of education and social demographic factors on female labor force participation in Indonesia. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 12(2).
- Maryanti, S., Lubis, N., & Widayat, P. (2022). Peran perguruan tinggi dalam optimalisasi penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 62-72.
- Melo, R. H., Lasulika, C., & Saleh, S. E. (2024). Optimalisasi bonus demografi melalui kebijakan kependudukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 143-148.
- Meo, T. B., Baowolo, D. L., Maro, B. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Memanfaatkan Bonus Demografi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Antara Potensi Produktif Dan Ancaman Pengangguran. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 21(12), 151-160.
- Muchtar, C. O., Purba, A. A., Sitorus, J. S., et al. (2024). *Systematic literature review: Examining Indonesia's educational inequality factors and government equity policies. International Journal of Educational Practice and Policy*
- Muhyiddin. (2025, April 28). *Indonesia's demographic bonus and the productivity imperative*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/04/29/indonesias-demographic-bonus-and-the-productivity-imperative.html>
- Ningrum, M. (2025). Efektivitas kebijakan link and match dalam pendidikan vokasi: Menakar kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5(1), 51-58.
- Nursyamsiah, T., Arshad, M. N. M., Idris, Z. Z., & Salleh, S. N. S. (2025). What drives female labour force participation in Indonesia? A systematic literature review. *e-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities*, 22(3), 340-. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2025.2203.27>
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Pratomo, D. S. (2017). Fenomena pengangguran terdidik di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage*, 7(7), 1.
- Pertiwi, E., Purnagunawan, R. M., Hadiyanto, F., & Alyasa, F. M. (2025). Personal Capital and Female Labor Force Participation in Indonesia: A Probit Analysis of Urban-Rural Contrasts. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 383-395.
- Purwati, W. D., & Prasetyanto, P. K. (2022). Analisis pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economina*, 1(3), 532-546.
- Rahmawati, A. R., & Siregar, R. S. K. (2020). Profil Internal Migrant Worker dan Lama Mencari Kerja di Banten. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 72-80.
- Rizky, D. (2026, 8 Januari). Pengangguran Gen Z Terdidik Tinggi, CSIS Sebut Pendidikan belum menjawab kebutuhan industri. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2026/01/08/130600026/pengangguran-gen-z-terdidik-tinggi-csis-sebut-pendidikan-belum-jawab-kebutuhan>
- Rospita, D., & Ismiyati, D. (2023). Mismatch dan Overeducation di Pasar Kerja Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 60-75.

- Rofiq, A., Saputra, A. D., & Mulyadi, D. (2020). Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Dunia Kerja di Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(1), 92–100
- Rohmawati, E. P., Tifani, V. M., & Rosanti, F. (2025). *Perwujudan link and match melalui penyelaras-an kurikulum untuk meningkatkan mutu lulusan pada pendidikan kejuruan*. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 14(1), 8–14. <https://jurnal.pendidikanperintis.com/index.php/jurnalpendidikanprofesional/article/view/79>
- Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). PROYEKSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI 2040. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 715–725.
- Sawitri, R., & Widarini, L. (2025). *Fenomena pengangguran terdidik dan pengaruhnya bagi bonus demografi di Indonesia: Tinjauan pustaka*. *Jurnal Syntax Literate*, 10(2), 275–287. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58189>
- Setyanti, A. M., & Finuliyah, F. (2022). Pengangguran terdidik pada masa pandemi Covid-19: Analisis pada data sakernas 2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 27-39.
- Siboro, S. R. J., Situmeang, R. U. M., Sihombing, O. K. J., & Pane, J. (2025). Pengangguran, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 770-774.
- Sidauruk, J. M., Susilowati, M., & Akbar, K. K. (2025). Indonesia's struggle with education inequality: Is reform the answer? *Indonesia Discourse*, 2(1), 59–84.
- Sulistiawati, R. (2021). Transisi Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP 2021*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Pontianak, Indonesia. Hal. 1–19
- Sulistyawati, E., Wiralaga, H. K., & Sebayang, K. D. A. (2024). Pengaruh pendidikan, kesehatan, upah, dan investasi modal fisik terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 105–116. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i2.869>
- The Jakarta Post. (2025, April 29). Indonesia's demographic bonus and the productivity imperative. *The Jakarta Post*. Retrieved March 19, 2026, from <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/04/29/indonesias-demographic-bonus-and-the-productivity-imperative.html>
- Thompson, W. S. (1929). Population. *American Journal of Sociology*, 34(6), 959–975. <https://doi.org/10.1086/214874>
- Utami, D. Y., & Armelly, A. (2023). *Demographic, economic, and human well-being: Their influence on unemployment rate of 34 provinces in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*, 12(4), 2359–2367. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3173>
- World Bank. (2010). *Indonesia jobs report: Towards better jobs and security for all*. World Bank. <https://documents.worldbank.org/curated/en/601901468285575499/Indonesia-Jobs-Report-Towards-better-jobs-and-security-for-all>
- Wibowo, A. S., Setiawan, F. D., & Suparmi, S. (2026). BONUS DEMOGRAFI 2030: KESIAPAN GENERASI MUDA MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(1), 1223-1235.
- Yanti, M. R., & Zahri, Y. P. (2025). Sinkronisasi Dunia Pendidikan dengan Dinamika Kebutuhan Pasar. *Personnel: Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(1), 22-28.
- Yuliani, C. (2025). *Analisis Jumlah Lulusan SLTA dan Sarjana terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Yuliasari, I. (2018) PELATIHAN HARD SKILL DAN SOFT SKILL DALAM REVOLUSI INDUSTRI MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK.
- Yunita, N. W. (2017). Begini Cara Pemerintah Maksimalkan Bonus Demografi RI. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3508409/begini-cara-pemerintah-maksimalkan-bonus-demografi-ri>
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Zulkifli, Z. (2024). Peran Balai Latihan Kerja Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(4), 702-709.
- ZULKIFLI ALWI. (2022). ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN